



KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LAPORAN  
TAHUNAN  
2018

REFORMASI  
HUKUM



e|gov  
PASTI



jogja  
istimewa

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini telah disusun Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun Anggaran 2018. Bahwa untuk mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY.

Laporan tahunan ini disusun sebagai upaya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu berfungsi Sebagai upaya mewujudkan *good governance* jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2018. Selain itu pula unttuk mewujudkan akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, laporan tahunan ini menjadi sarana bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajaran untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Secara umum pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2018 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai barometer pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dan jajaran berada pada angka 99,62 % (sembilan puluh sembilan koma enam puluh dua persen), baik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Hukum dan HAM maupun kegiatan teknis lainnya.

Selanjutnya, dalam pelaksnaan reformasi birokrasi, selama tahun anggaran 2018 Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta telah menjalankan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2014-2019 dalam 8 (delapan) area perubahan dan mengembangkan berbagai program berbasis elektronik (*e-government*) untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance*

dan memberikan pelayanan publik terbaik di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY adalah muara akhir tujuan seluruh jajaran Kemenkumham. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, harapan publik akan pelayanan sesuai aturan akan terwujud dan masyarakat memperoleh kepastian. Mari kita gelorakan semangat pengabdian, kita tingkatkan kinerja lebih keras, lebih keras, dan lebih keras lagi. Tumbuhkan semangat kerja Nyata, kerja PASTI (*one team, one vision, one goal*), dan kami PASTI, pasti profesional, pasti akuntabel, pasti sinergi, pasti transparan dan pasti inovatif.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Yogyakarta, Januari 2019  
Kepala Kantor Wilayah

KRISMONO  
NIP. 19611217 198503 1 001



## DAFTAR ISI

Halaman

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Maksud dan Tujuan.....	2
	C. Dasar Hukum.....	3
	D. Tugas dan Fungsi.....	3
<b>BAB II</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III</b>	<b>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	<b>13</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
	1. Divisi Administrasi.....	14
	2. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	21
	3. Divisi Pemasyarakatan.....	28
	4. Divisi Keimigrasian.....	34
	B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018.....	39
	C. Realisasi Anggaran.....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
	A. Kesimpulan.....	48

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan instansi terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah dan dibantu oleh para kepala divisi.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan ketentuanperaturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengorganisasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Sebagai bentuk akuntabilitas kepada seluruh pihak, semua kegiatan yang telah terprogramkan dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2018 harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pimpinan, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga kepada seluruh masyarakat dan *stake holder* khususnya para penerima layanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertimbangan tersebut yang kemudian melatarbelakangi penyusunan laporan tahunan tahun 2018 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAMRI;
2. Sebagai upaya mewujudkan *good governance* jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018;
3. Mewujudkan akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, laporan tahunan merupakan sarana bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajaran untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya;
4. Memahami akan keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018;
5. Mendorong Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peratueran perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

6. Sebagai usaha bersama mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

### C. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Laporan tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 ini berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
4. Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### D. TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS	FUNGSI
DIVISI ADMINISTRASI Melaksanakan tugas sebagian Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;</li> <li>2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan lapotan;</li> <li>3. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rummah tangga; dan</li> <li>4. Pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi</li> </ol>
Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;</li> <li>2. Pengelolaan teknologi informasi, pengolahan data dan penyajian informasi, serta pelayanan pengaduan;</li> </ol>

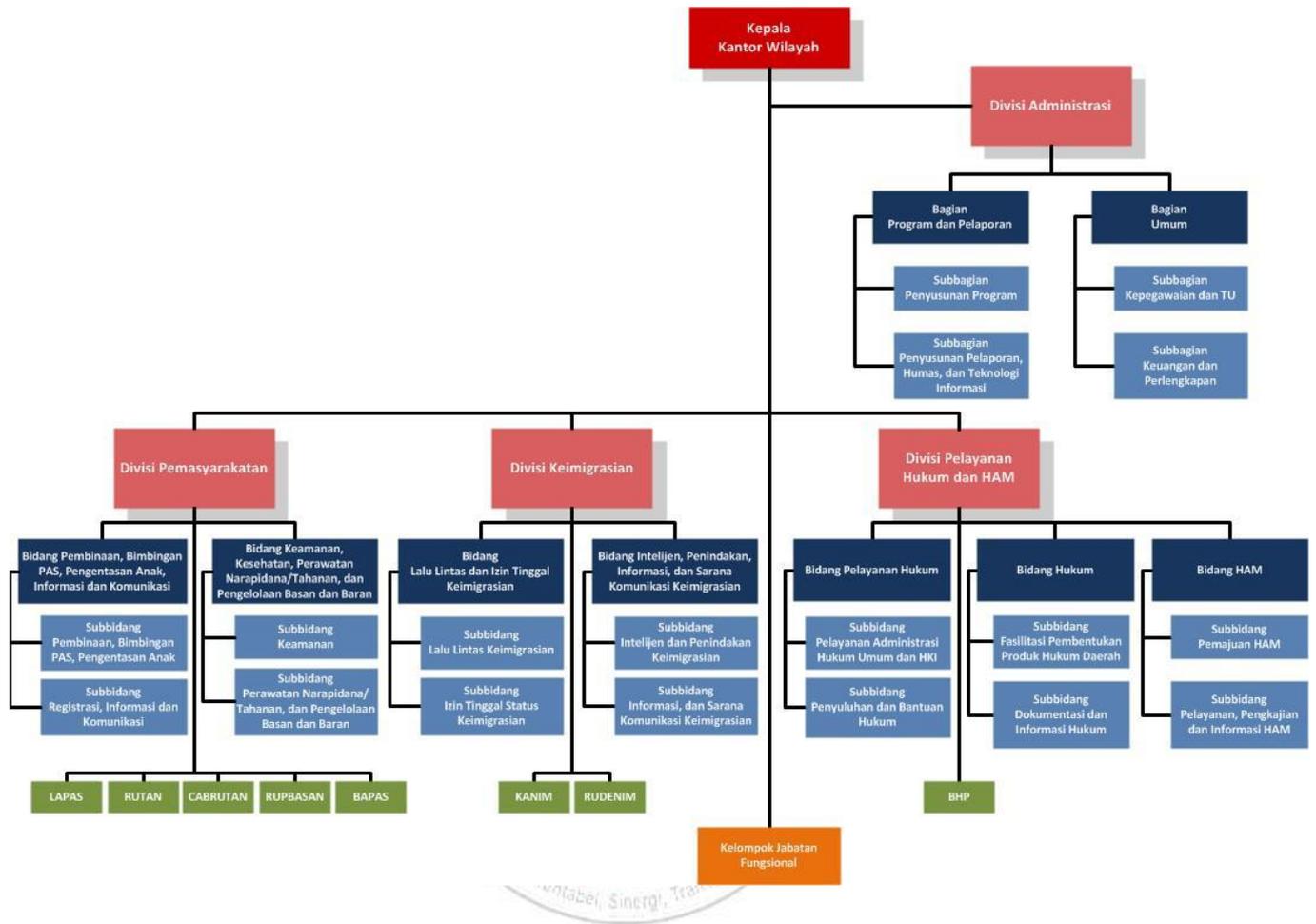
<p>penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pengolahan dan penyajian data, pemberian informasi dan komunikasi, protokoler, kehumasan, dan hubungan antarlembaga serta evaluasi dan laporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan protokoler, kehumasan, dan hubungan antarlembaga; dan</li> <li>4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan</li> </ol>
<p>Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan tata usaha, serta rumah tangga, dan melaksanakan koordinasi pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha;</li> <li>2. Pengelolaan urusan kepegawaian;</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;</li> <li>4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan; dan</li> <li>5. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga</li> </ol>
<p><b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b> Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara;</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, informasi dn komunikasi, keamanan, kesuhatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara;</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan;</li> <li>4. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, saran dan prasaranan, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemsarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi</li> </ol>
<p>Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemsarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi.</li> </ol>

<p>laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi</p>	
<p>Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.</li> </ol>
<p>DIVIS KEIMIGRASIAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan</li> <li>4. Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi</li> </ol>
<p>Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan</li> </ol>

<p>dokumen perlintasan, tempat pemeriksaan imigrasi, izin tinggal keimigrasian, dan status kewarganegaraan</p>	
<p>Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, serta informasi dan sarana komunikasi keimigrasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, dan rumah detensi imigrasi; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian</li> </ol>
<p>DIVISI YANKUM Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah; pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengkoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penelitian di bidang hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengkoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>4. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</li> </ol>

<p>Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah.</li> </ol>
<p>Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitas perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitas pembentukan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis.</li> </ol>

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 28 Tahun 2014).



## SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi yang terdiri dari 4 (empat) Divisi serta 16 UPT, 15 (lima belas) UPT Pemasarakatan dan 1 (satu) UPT Imigrasi.

No	UPT	ALAMAT
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 376126-375802 Fax (0274) 376126 Email : <a href="mailto:lapasjogja86@yahoo.com">lapasjogja86@yahoo.com</a>
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Kaliurang Km. 17 Yogyakarta Telp. (0274) 895433 Faksimili : (0274) 895422 Email : <a href="mailto:lapas_narkotika_jogja@yahoo.co.id">lapas_narkotika_jogja@yahoo.co.id</a>
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN	Alamat Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman 55288 Yogyakarta Telp/Fax : (0274) 867585 Email : <a href="mailto:lapas_sleman@yahoo.co.id">lapas_sleman@yahoo.co.id</a> Website : <a href="http://www.lapassleman.com">www.lapassleman.com</a>
4	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Taman Siswa No. 6A Yogyakarta Telp. (0274) 450247 Fax. (0274) 450248 Email : <a href="mailto:rutanjogja@gmail.com">rutanjogja@gmail.com</a>
5	RUTAN KELAS IIB BANTUL	Jalan Guwosari Pajangan Bantul Telp. (0274) 6462012 Faks : 6461011 Email : <a href="mailto:rutan.bantul@yahoo.co.id">rutan.bantul@yahoo.co.id</a>
6	RUTAN KELAS IIB WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : <a href="mailto:www.wonosarirutan@ymail.com">www.wonosarirutan@ymail.com</a>
7	RUTAN KELAS IIB WATES	Jalan Suparman No. 03 Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773051 Fax (0274) 773015 Email : <a href="mailto:rutanwates@yahoo.co.id">rutanwates@yahoo.co.id</a>
8	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	Jalan Trikora No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 374307 Fax (0274) 376324 Email : <a href="mailto:bapas_yogyakarta@yahoo.co.id">bapas_yogyakarta@yahoo.co.id</a>
9	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 392929 Email : <a href="mailto:bapaswonosari@yahoo.com">bapaswonosari@yahoo.com</a>
10	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa No. 8 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 419435 – 389170 Email : <a href="mailto:rupbasanyk@gmail.com">rupbasanyk@gmail.com</a> , <a href="mailto:rupbasanyk@yahoo.com">rupbasanyk@yahoo.com</a> Website : <a href="http://www.rupbasanjogja.com">www.rupbasanjogja.com</a>
11	RUPBASAN BANTUL	Jalan Srandakan Pandak Wijirejo Pandak Bntul 55761 Telp/Faksimile : (0274) 6462376 Email : <a href="mailto:rupbasanbantul@yahoo.com">rupbasanbantul@yahoo.com</a>
12	RUPBASAN WONOSARI	Jalan Ki Ageng Giring No. 10 Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp./Fax : (0274) 394185 Email : <a href="mailto:rupbasan_wonosari@yahoo.com">rupbasan_wonosari@yahoo.com</a>
13	RUPBASAN WATES	Jalan Sugiman Gang Bispa No. 1 Wates Telp./Fax : (0274) 7496799, 775322 Email : <a href="mailto:rupbasanwates@gmail.com">rupbasanwates@gmail.com</a> ,
14	KANTOR IMIGRASI	Jalan Solo Km 10 Yogyakarta. Po.Box. 10 YKAP Telp (0274) 487130, 489165 Email : <a href="mailto:kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id">kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id</a>
15	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta 55111 Email : <a href="mailto:lpjogja2016@yahoo.co.id">lpjogja2016@yahoo.co.id</a>
16	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK YOGYA	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : <a href="mailto:lpkajogja@gmail.com">lpkajogja@gmail.com</a>

## BAB II

### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY melaksanakan kegiatan dengan 10 (sepuluh) DIPA. Untuk merealisasikan 10 (sepuluh) DIPA tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY melaksanakan program sebagai berikut:

- \* Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian Hukum dan HAM DIY, Pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Hukum dan HAM;
- \* Program Administrasi Hukum Umum, Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah;
- \* Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat, Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah;
- \* Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian, Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah;
- \* Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Kekayaan di Kantor Wilayah;
- \* Program Pembentukan Hukum, Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah;
- \* Program Pemajuan Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah;
- \* Program Pembinaan Hukum Nasional, Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah;
- \* Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah;
- \* Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah.

## 1. Kegiatan

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tersebut masih berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program, oleh sebab itu diperlukan operasionalisasi dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan. Adapun Rencana Kinerja/ kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

### a. Divisi Pemasarakatan

Penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah.

Untuk merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah, Divisi Pemsarakatan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi Bintorwasdal terhadap UPT PAS;
2. Menerima usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) dari Lapas/Rutan;
3. Menerima laporan bulanan dari UPT;
4. Menerima usulan remisi dari Lapas/Rutan;
5. Monitoring Sistem Database Pemsarakatan (SDP);
6. Melaksanakan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib) secara terjadwal dan insidental di seluruh UPT PAS;
7. Pengarsipan data Divisi Pemsarakatan.

### b. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia;
2. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang notariat;
3. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang kewarganegaraan.
4. Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia;
5. Hasil kajian hak asasi manusia.
6. Dokumen permohonan HKI yang diterima Kantor Wilayah;
7. Promosi dan diseminasi di daerah;
8. Penegakan hukum di daerah;
9. Database kekayaan intelektual komunal.
10. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah;

11. Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah.
12. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat daerah;
13. Penelitian dan pengembangan sistem hukum di daerah;
14. Dokumentasi dan jaringan informasi hukum di daerah;
15. Kesadaran hukum masyarakat daerah;
16. Orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum.

#### c. Divisi Imigrasi

Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian.

Untuk merealisasikan kegiatan Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RKA-K/L fungsi Keimigrasian;
2. Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian;
3. Pembinaan Koordinasi dan konsultasi program kegiatan;
4. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang intelijen, penindakan, informasi dan sarana komunikasi Keimigrasian;
5. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang lalu lintas dan izin tinggal Keimigrasian.

#### d. Divisi Administrasi

1. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor wilayah;
2. Layanan keuangan Kanwil Kemenkumham;
3. Layanan penata usahaan BMN Kanwil Kemenkumham;
4. Layanan kepegawaian Kanwil Kemenkumham;
5. Layanan kehumasan Kanwil Kemenkumham;
6. Layanan perkantoran;
7. Peralatan dan fasilitas perkantoran;
8. Gedung/ bangunan.
9. Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

**BAB III****CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani bersama. Selain itu, dalam tataran ideal, akuntabilitas tersebut sebagai pengukuran atas tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, rencana strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sistem penyampaian pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Pemasyarakatan, Unit Imigrasi serta kegiatan Administrasi serta Pelayanan Jasa Hukum dan HAM di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, sebagai bentuk akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menyusun Laporan Tahunan tahun 2018 dengan berpedoman peraturan yang berlaku. Laporan tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah DIY yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Divisi Administrasi

Selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018 pelaksanaan tugas Divisi Adminitrasi dilaksanakan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Penyusunan Pelaporan Humas dan TI dijabarkan dalam tabel berikut :

**Capaian Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2018**

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan persuratan dan tata usaha tahun 2018	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2018
2.	Terlaksananya kegiatan Latsar CPNS TA 2017 bekerja Badiklat DIY	Panitia Kanwil Kemenkumham DIY, Panitia Badiklat DIY, peserta 188 CPNS TA 2017
3.	Pelaksanaan Orientasi CPNS TA 2017	CPNS Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY 188 CPNS TA 2017
4.	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan JFT Perancang, Penyuluh hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, Pranata Komputer, Analisis Keimigrasian, Arsiparis, dan Analisis Kepegawaian	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2018
5.	Penerbitan SK Hukuman Disiplin, Penerbitan KGB, SK Mutasi/ Pindah, Cuti Pegawai, Surat Ijin Kuliah, Laporan selesai kuliah, penghargaan Satyalancana, pensiun, Ujian Dinas dan Ujian Penyetaraan Ijazah	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2018
6.	Kegiatan Penguatan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan Pemberian Bimtek Pembuatan Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif melalui <i>Video Teleconference</i>	Pegawai yang ditunjuk
7.	Kegiatan Pendampingan CPNS dalam rangkan Pengarahan Menkumham di Semarang	Seluruh CPNS jajaran Kemenkumham DIY
8.	Presidential Lecture Untuk CPNS melalui Teleconference	Pejabat Struktural Kanwil, Ka-UPT dan Seluruh CPNS
9.	Penguatan Pendampingan Aplikasi SISUMAKER oleh Pusdatin	Pejabat Struktural Kanwil, Operator dan Perwakilan UPT
10.	Workshop Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN oleh Badan Kepegawaian Negara	14 Agustus 2018, Hotel Horaios Yogyakarta Peserta 44 orang
11.	Pelaksanaan proses CPNS TA 2018 meliputi pengiriman berkas melalui PO BOX, verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan, SKD, SKB Kesamaptaan dan Pengamatan Fisik dan Ketrampilan	Bekerja sama dengan Ombudsman terkait transparansi proses seleksi, Brimob terkait Kesamaptaan, BKN terkait pelaksanaan CAT
12.	Kegiatan pembaretan CPNS TA 2019 dan pemberian SK PNS	188 pegawai

13.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Diikuti oleh 42 Orang terdiri dari Operator SAIBA dan SIMAK BMN
14.	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Anggaran oleh Biro Keuangan	30 Orang terdiri dari pejabat dan staf Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
15.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 12 Indikator Pelaksanaan Anggaran	Pengelola keuangan seluruh UPT se-DIY
16.	Pelaksanaan Ekstrafooding	Setiap hari Jumat setelah pelaksanaan senam pagi
17.	Pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY/ rumah dinas/ wisma tamu	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2018
18.	Rapat Analisa Kebutuhan Anggaran 2019	Diikuti Tim Biro Perencanaan, staf Penyusunan Program dan Operator RKAKL UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY
19.	Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta	28-29 Maret 2018 Aula Kanwil Kemenkumham Yogyakarta
20.	Monitoring Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi Penyusunan Program dan Pelaporan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Seluruh satuan Kerja di DIY
21.	Workshop Tunas Integritas pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta	7-9 Mei 2018 Ballroom Hotel Pandanaran Yogyakarta
22.	Rapat Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2019	Senin 25 Juni 2018 Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham DIY
23.	Monitoring Penyusunan Program dan Pelaporan Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019	Seluruh satuan Kerja di DIY
24.	Rapat Koordinasi Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, Kalender Kerja, Kalender Kegiatan, Standar Pelayanan Publik Satuan kerja Kantor Wilayah dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019	
25.	Tersusunnya Laporan Kegiatan dan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2018	Telah dilakukan digitalisasi laporan dan dikirimkan ke pusat
26.	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY tahun 2018	Telah dilakukan digitalisasi laporan dan dikirimkan ke pusat
27.	Tersusunnya Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY tahun 2018	Telah dilakukan digitalisasi laporan dan dikirimkan ke pusat

28.	Tersusunnya Laporan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY B03, B06, B09, dan B12 tahun 2018	Telah dilakukan digitalisasi laporan dan dikirimkan ke pusat
29.	Terlaksananya peliputan dan pemberitaan kegiatan Kantor Wilayah selama tahun 2018	Website, Instagram, Facebook, dll
30.	Terlaksananya kegiatan keprotokoleran Kantor Wilayah selama tahun 2018	Pelaksanaan pada bulan Januari-Desember 2018

### **Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Disbursement Plan**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja Pagu Alokasi Anggaran T.A 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 22 November 2018 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agenda utama dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja Pagu Alokasi Anggaran T.A 2019 di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

- ❖ Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
- ❖ Penyusunan Disbursement Plan Tahun 2019;
- ❖ Penyusunan Procurement Plan Tahun 2019;
- ❖ Penyusunan Kalender Kegiatan dan Kalender Kerja tahun 2019;
- ❖ Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2019;

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Kantor Wilayah.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : SP DIPA – 013.01.2.409181/2018 tanggal 07 Desember 2017.

## Peningkatan Kualitas BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan

Selama semester II tahun 2018 melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan pengelolaan BMN dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.

### LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DINERACA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	82,110,721	0	82,110,721
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
131111	Tanah	55,954,736,000	0	55,954,736,000
132111	Peralatan dan Mesin	13,314,458,342	10,601,994,364	2,712,463,978
133111	Gedung dan Bangunan	12,916,091,000	216,914,071	12,699,176,929
134111	Jalan dan Jembatan	0	0	0
134112	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	379,438,670	0	379,438,670
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	14,500,000	14,500,000	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	276,399,500	106,410,500	169,989,000
J U M L A H		82,937,734,233	10,939,818,935	71,997,915,298

Tabel Keadaan Rumah Dinas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta

No.	Rumah Dinas	Ket
1.	Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	Jl. Sunaryo No. 6 Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta
2.	Rumah Dinas Kepala Divisi Administrasi	Jl. HOS Cokroamkinoto 158, Tegalrejo, Yogyakarta
3.	Rumah Dinas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Jl. HOS Cokroaminoto No. 158 Tegalrejo, Yogyakarta
4.	Rumah Dinas Kepala Bagian PPL	Jl. Kenanga TR III/769, Tegalrejo, Yogyakarta
5.	Rumah Dinas Kepala Bidang Hukum	Jombor Lor 83, Sinduadi, Mlati, Sleman
6.	Rumah Dinas	Jombor Baru Blok 8 No.187, Sendangadi, Mlati, Sleman
7.	Rumah Dinas	Jl. Margotirto, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
8.	Rumah Dinas	Jl. HOS Cokroamkinoto 158, Tegalrejo, Yogyakarta
9.	Rumah Dinas	Jl. Pleret, Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul

## Peningkatan kualitas fungsi kepegawaian (Penatausahaan dan Pembinaan/Pengembangan Kepegawaian)

Untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan fungsi kepegawaian, Subag Kepegawaian dan TU menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menopang Penatausahaan dan Pembinaan/Pengembangan Kepegawaian untuk 1.286 pegawai, dengan berbagai kegiatan diantaranya ialah:

### Pelaksanaan Seleksi CPNS

Seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, dan Sat Brimobda DIY. Adapun tahapan seleksi penerimaan CPNS adalah: Verifikasi Berkas PO BOX, Verifikasi Berkas Asli dan Pengukuran Tinggi Badan, CAT SKD, CAT SKB, Kesamaptaan, Wawancara dan Pemberkasan.

### DAFTAR PESERTA YANG LOLOS CPNS TA 2018

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

URAIAN	JUMLAH	JABATAN
Tingkat S1	2	Pengelola Teknologi Informasi
Tingkat D3	1	Pengelola Keuangan
Tingkat SLTA	Laki-laki 12	Penjaga Tahanan
	Perempuan 3	
Total	18	

**DATA PEGAWAI JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM DIY TAHUN 2018**  
**SEBANYAK 1.286 ORANG**

Pegawai di seluruh wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 1.286 orang dengan rincian 887 pegawai laki-laki dan 399 pegawai perempuan. Kondisi Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dilihat dari statistik dibawah ini :

Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
I/d	1
II/a	161
II/b	100
II/c	91
II/d	34
III/a	194
III/b	341
III/c	120
III/d	197
IV/a	28
IV/b	12
IV/c	7

Dari statistik pegawai berdasarkan golongan ruang diatas terlihat bahwa 66,25% atau sejumlah 852 orang pegawai merupakan pegawai dengan golongan III. Hal ini merupakan *human capital* yang sangat potensial bagi jajaran Kanwil Kemenkumham DIY.

Pendidikan	Jumlah
SLTP	1
SLTA	506
DIPLOMA	62
S1	553
S2	76
S3	1

Sedangkan dari segi pendidikan, lulusan SLTA dan S1 masih mendominasi dengan rincian pegawai dengan pendidikan SLTA sejumlah 506 orang dan yang berpendidikan S1 sejumlah 553 orang. Lulusan S2 hanya terdapat 76 orang pegawai dan hanya terdapat seorang pegawai dengan gelar Doktor.

### Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fungsi Kehumasan

Selama tahun 2018, Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas, dan TI melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.

- a) Peliputan dan Penyusunan Berita Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY selama tahun 2018.
- b) Publikasi kegiatan Kanwil Kemenkumham DIY, dalam bentuk: pembuatan laporan, iklan dan *pres conference*, dokumentasi, spanduk, backdrop, banner dan ATK.

No	Kegiatan	Jumlah	Ket
1.	Spanduk, Backdrop, Banner	80 Buah	
2.	Dokumentasi Foto	4 Laporan	
3.	Berita Website	247 berita	
3.	Iklan	4 Iklan	
4.	Press Conference	12 Kali	
5.	Target Kinerja	4 Laporan	
6.	Laporan Triwulan	4 Laporan	
7.	Target Capaian	4 Laporan	
8.	Kliping	4 Laporan	
9.	Laporan Tahunan	1 Laporan	
10.	LAKIP	2 Laporan	

- c) Kerjasama Instansi dengan Ombudsman Perwakilan Propinsi D.I. Yogyakarta  
Kerjasama yang dilakukan dalam rangka menciptakan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018 yang jujur dan transparan. Dibentuk Pos Pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2018.

## DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selama tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Diskusi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	7-15 Februari 2018
2.	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi geografis	5 Apeil 2018, Hotel Sahid Jaya DIY
3.	Penyusunan Raperda, Harmonisasi Raperda, HarmonisasiPerda, Mediasi dan Konsultasi Perda/Raperda	Waktu pelaksanaan bulan Januari sampai dengan Desember 2018 Tempat pelaksanaan: - Kantor wilayah - Biro hukum provinsi - DPRD provinsi/Kab/Kota - Bagian hukum kab/kota - Satuan kerja perangkat daerah
4.	Pelayanan DIH (Penyediaan Bahan Bacaan, Peminjaman Buku dan peraturan )	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat Obyek: Pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM , Mahasiswa, Masyarakat Umum
5.	Penyelenggaraan pemajuan HAM di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY	Berhasil memperoleh predikat Kabupaten/Kota peduli HAM untuk seluruh wilayah Kab/kota di DIY
6.	Pelaksanaan Diseminasi HAM	Berhasil memperoleh predikat Kabupaten/Kota peduli HAM untuk seluruh wilayah Kab/kota di DIY
7.	Pelaksanaan koordinasi Yankomas	Dilaksanakan ke seluruh Kabupaten/Kota di DIY
8.	Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) Indikasi Geografis	5 April 2018 di Hotel Sahid Jaya
9.	Pelaksanaan Sosialisasi Kewarganegaraan	17 April 2018 di Hotel Sahid Jaya
10.	Expo layanan Hukum dan KI jabatan notaris pengganti	23-28 April 2018 Jogja City Mall
11.	Monitoring dan Evaluasi Domkumentasi dan Informasi Hukum	Mengamati, identifikasi atas permasalahan yang terjadi dan mengetahui perkembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum seluruh UPT di DIY

12.	Penyusunan Data Base Peraturan Perundang-undangan	Menginventarisasi informasi/data mengenai Perda
13.	Kegiatan Sosialisasi Fidusia “Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia”	12 September 2018, Gedung Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada
14.	Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM	19 Juli 2018 <b>Tempat</b> :Wisma Sargede Yogyakarta <b>Peserta</b> :45 (empat puluh lima) Perwakilan dari SKPD se DIY

**Terselenggaranya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris**

Rekapitulasi Pengambilan Sumpah Notaris Selama Tahun 2018

NO	Tanggal	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	05 Januari 2018	Raden Rara Sulasmi, S.H.		NP
2	10 Januari 2018	Hana Prisca	Kota	NP
		Sri Wulandari, S.H., M.Kn.		Pindah
3	15 Februari 2018	Bagas Lugasa, S.H., M.Kn.	Sleman	
4	19 Maret 2018	Meilina Wulandari	Gunungkidul	NP
5	28 Maret 2019	Astrid Paramitha, S.H., M.Kn	Sleman	NP
6	30 April 2018	Fakhrisyah Zalili Sailan, S.H., M.Kn.	Sleman	NP
		Usman Ismail, S.H.	Kota	NP
		Dyah Oktafiani Rahayuningsih, S.H.	Bantul	NP
		Nanang Sugiarto, S.H	Bantul	NP
		Fakhir Tashin Baaj, SH	Sleman	NP
7	03 Agustus 2018	Dina Nerry Rosida, S.H., M.Kn	Gunungkidul	NotarisBaru
8	29 Oktober 2019	Puspita Siwi Gustia, S.H., M.Kn	KulonProgo	NotarisBaru
		Kristiningrum Sarla Wisnuwiharjo	KulonProgo	NotarisBaru
		Virsa Ira Ramadhani	KulonProgo	NotarisBaru
		Anita Noviana Ningrum, S.H., M.Kn.	KulonProgo	NotarisBaru
		Dwi Aulia Destiana, S.H., M.Kn	KulonProgo	NotarisBaru
		Alfilia Putri Vidityasari, S.H., M.Kn.	KulonProgo	NotarisBaru
9		Raden Rara Sulasmi, SH	Kota Yogyakarta	NP

## Rekapitulasi Pengambilan Sumpah PPNS Selama Tahun 2018

No.	Nama/ NIP/ Tempat Tgl lahir	Instansi & Wilayah Kerja	Waktu Pelantikan
1	2	3	4
1.	Ibnu Muhammad, S.Sos. NIP. 19670514 199203 1 005 Sleman, 14 Mei 1967	Satpol PP DIY Wilayah kerja DIY	17 Jan 2018
2.	Inneke Dian Kurniasih, S.H. NIP. 19840101 200902 2 009 Yogyakarta, 01 Jan 1984	Satpol PP DIY Wilayah kerja DIY	17 Jan 2018
3.	Lazuardi, S.Si.T, M.M. NIP. 19740714 199903 1 005 Malang, 14 Juli 1974	Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah kerja DIY	17 Jan 2018
4.	Catur Priyo Pamungkas NIP. 19690909 199201 1 002 Yogyakarta, 09 Sept 1969	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Wilayah kerja DIY	17 Jan 2018
5.	Y. Wira Sasongko Putro, ST. NIP. 19830304 201101 1 011 Sleman, 04 Maret 1983	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM Wilayah kerja DIY	17 Jan 2018
6.	Cahaya Prihantama, SKM., M.PH. NIP. 19840409 200902 1 005 KulonProgo, 09 April 1984	Dinas Kesehatan Pemkab. Sleman Wilayah kerja Kab. Sleman	17 Jan 2018
7.	Siti Farida, S.IP. NIP. 19740822 200604 2 021 Bantul, 22 Agustus 1974	Satpol PP Kab. Bantul Wilayah kerja kab. Bantul	17 Jan 2018
8.	Sismadi NIP. 19640912 198503 1 009 Bantul, 12 Sept 1964	Satpol PP Kab. Bantul Wilayah kerja Kab. Bantul	17 Jan 2018
9.	Meyce Dwi Waryuni, S.H. NIP. 19810530 200604 2 034 Bengkulu, 30 Mei 1981	Satpol PP Kab. Kulon Progo Wilayah kerja Kab. Kulon Progo	17 Jan 2018
10.	Bekti Nurada, S.Sos. NIP. 19690112 199802 1 001 KulonProgo, 12 januari 1969	Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo Wilayah kerja Kab. Kulon Progo	17 Jan 2018

Selama tahun 2018 telah dilaksanakan pengambilan sumpah notaris sebanyak 19 notaris. Sedangkan pada kegiatan pengambilan sumpah PPNS telah dilakukan 10 orang PPNS sampai dengan akhir November 2018.

## Data Permohonan Kewarganegaraan

No.	Permohonan	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Pewarganegaraan (pasal 9) UU No. 12 Thn 2006			NIHIL
2.	Penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi WNI Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan (Permenkumham RI No. 35 Tahun 2015)			NIHIL

Selama tahun 2018 belum terdapat permohonan kewarganegaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

## Terselenggaranya Layanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah

Data permohonan HKI  
Tahun 2018

Layanan	Merek	Paten	Desain Industri	Hak Cipta	Indikasi Geografis
<b>TOTAL</b>	<b>1525</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>921</b>	<b>3</b>

Pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018 terdapat 1.525 permohonan Merek, 50 permohonan Paten, 50 permohonan Desain Industri, 921 permohonan Hak Cipta dan 3 permohonan layanan Indikasi Geografis.

## Program Pembentukan Produk Hukum di Daerah

Rekap Perda Terfasilitasi  
Tahun 2018

No	Wilayah	Perda
1.	Propinsi DIY	11
2.	Kab. Kulon Progo	7
3.	Kab. Bantul	18
4.	Kota Yogyakarta	9
5.	Kab. Gunung Kidul	2
6.	Kab. Sleman	15
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>

Pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018 baik untuk tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota terdapat Perda yang sudah ditetapkan sebanyak 62 Perda. Sedangkan untuk kegiatan mediasi dan konsultasi Raperda selama tahun 2018 telah menghasilkan 58 Raperda.

Perancang Perundang-undangan di Kantor Wilayah DIY  
Tahun 2018

NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
SANTI MEDIANA PANJAITAN, SH, MH	197805242001122001	PEMBINA (IV/a)	PERANCANG MADYA
WISNU INDARYANTO, SH	198501212009121004	PENATA ( III/c )	PERANCANG MUDA
FARID ARIO YULIANTO, SH	197907282009121002	PENATA MUDA TK I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
NI MADE WULAN, SH., MH	198302072008012004	PENATA ( III/c )	PERANCANG MUDA
NOVA ASMIRAWATI, SH., LLM	197506072001122001	PENATA TK I ( III/d )	PERANCANG PERTAMA
HANDOKO WAHYUDI, SH	198512102010121005	PENATA MUDA TK I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
DANAN MAHENDRA, SH	198404192010121005	PENATA MUDA TK I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
ANITA MARTHASARI, SH	198203182010122002	PENATA MUDA TK. I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
ANDIKA DISTRI ANTOKO, SH., MH	198512032009011002	PENATA ( III/c )	PERANCANG MUDA
IKA CAHYANINGTYAS, SH	198201142010122001	PENATA MUDA TK. I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
RULY NINDASARI SIHMAWATI, SH	198410182010122003	PENATA MUDA TK I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
HERU PURNOMO, SH	196703221994031002	PENATA ( III/c )	PERANCANG MUDA
ANDIKA DISTRI ANTOKO, SH., MH	198512032009011002	PENATA ( III/c )	PERANCANG MUDA
IKA CAHYANINGTYAS, SH	198201142010122001	PENATA MUDA TK. I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
HERIBERTUS ANDRI ARI AJI, SH	197101192003121001	PENATA ( III/c )	PERANCANG MUDA
ANASTASIA RANI WULANDARI, SH	198110012009122002	PENATA MUDA TK. I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
RATRI YULIA PRATIWI, SH	198707012012122001	PENATA MUDA ( III/a )	PERANCANG PERTAMA
YULIUS KOLING LAMANDAU SH	199006062012121003	PENATA MUDA ( III/b)	PERANCANG PERTAMA
SERAFINA SHINTA DEWI, SH., MH	198009092005012001	PENATA ( III/c )	PERANCANG MUDA
AGUSTINUS TRI WAHYUDI, SH	197504052009121002	PENATA MUDA TK I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
YOSEPHINA PERWITASARI, SH	198411212009122003	PENATA MUDA TK. I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
SYAFRIEL HEVITHA ENDYANI, SH	198710112012122001	PENATA MUDA TK.I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA
YUSTI BAGASUARI, SH	198901042012122002	PENATA MUDA TK.I ( III/b )	PERANCANG PERTAMA

Per tanggal 31 Desember 2019 jumlah JFT Perancang Perundang-undangan di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DIY adalah sebanyak 23 orang pegawai. Adapun rinciannya adalah Perancang Madya 1 orang, Perancang Muda 7 orang, dan Perancang Muda 15 orang.

### Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di KanwilKemenkumham DIY meliputi :

NO.	JENIS KOLEKSI	JUMLAH	KETERANGAN
A	BUKU	7493 eksemplar (4707 judul)	Sebagian besar berupa buku-buku hukum
B	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ENGELBRECHT, UU, PERPU, PP, PERPRES/ INPRES)	Dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2014	Database peraturan dalam bentuk buku LN-TLN/BN-TBN dan premise di komputer
C	HIMPUNAN PERATURAN DAERAH SE-DIY	198 judul	LD/BD, Informasi peraturan perundang-undangan daerah

## Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

### 1. Proses Verifikasi Dan Akreditasi OBH

Dalam proses verifikasi, akreditasi dan re-akreditasi OBH periode 2019-2021 pada tahun 2018, langkah yang dilakukan :

#### A. Verifikasi dan Akreditasi OBH baru

- a. Mempublikasikan waktu, persyaratan dan tata cara verifikasi, akreditasi dan re-akreditasi OBH.
- b. Memeriksa Pendaftaran secara online
- c. Verifikasi factual memeriksa data yang sudah di upload pada aplikasi sidbankum.go.id dengan bukti fisik asli
- d. Verifikasi lapangan dengan melihat dan menilai kondisi OBH dari segi tempat, kelengkapan kerja, jumlah staf administrasi dll
- e. Melakukan rapat penilaian dengan kelompok kerja
- f. Mengirimkan hasil penilaian kepada Penitia Pengawas Pusat

#### B. re-Akreditasi OBH

- a. mempublikasikan waktu, persyaratan dan tata cara re-akreditasi OBH.
- b. Memeriksa Pendaftaran secara online
- c. Verifikasi factual memeriksa data yang sudah di upload pada aplikasi sidbankum.go.id dengan bukti fisik asli
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja OBH dengan mengambil responden dari penerima bantuan hukum
- e. Melakukan rapat penilaian dengan kelompok kerja
- f. Mengirimkan hasil penilaian kepada Penitia Pengawas Pusat

Dari hasil kegiatan verifikasi dan akreditasi OBH periode 2019-2021, untuk calon OBH yang masuk dalam aplikasi sidbankum berjumlah 21 OBH dengan calon OBH yang lolos verifikasi pada tingkat Panwasda berjumlah 9 calon OBH yaitu :

- 1) Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yudha
- 2) Yayasan Lembaga Perlindungan Anak D.I.Yogyakarta
- 3) Lembaga Bantuan Hukum Senopati
- 4) Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Sleman
- 5) Lembaga Bantuan Hukum Harapan

- 6) Yayasan Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang
- 7) Yayasan Bantuan Hukum Arto Moro
- 8) Yayasan Bantuan Hukum Ram Indonesia
- 9) Lembaga Bantuan Hukum Sembada

Sedangkan untuk OBH yang melakukan re-akreditasi sebanyak 16 OBH dari 19 OBH yang terakreditasi pada periode 2016-2018

## 2. Sosialisasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum

Dalam mensosialisasikan *sidbankum*, divisi pelayanan hukum dan ham selalu melakukan pertemuan rutin kepada seluruh OBH, yang kaitannya dengan pembaharuan system, adanya surat edaran dari BPHN, percepatan penyerapan anggaran Bantuan hukum dan menampung serta memberikan solusi permasalahan yang di hadapi OBH di lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, membuat group pada aplikasi WA, sosialisasi dengan mengundang seluruh OBH dan pemangku kepentingan di daerah.



## DIVISI PEMASYARAKATAN

Mewujudkan Petugas UPT Pemasarakatan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI) merupakan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan UPT Pemasarakatan. Oleh sebab itu untuk merealisasikan rencana dimaksud Divisi Pemasarakatan melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini sebagaimana fungsi Divisi Pemasarakatan yakni, Pembinaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bimbingan pamasarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pamasarakatan, pengentasan anak, informasi dn komunikasi, keamanan, kesuhatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, saran dan prasaranan, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pamasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 28 Tahun 2014, Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasarakatan berfungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pamasarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda dan barang rampasan negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pamasarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan dan;

- d. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 28 Tahun 2014, Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasarakatan berfungsi :

- e. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pamasarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda dan barang rampasan negara;
- f. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pamasarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- g. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan dan;
- h. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta membawahi 15 UPT Pemasarakatan yang terdiri dari : 4 Lapas, 4 Rutan, 1 LPKA, 2 Bapas, dan 4 Rupbasan. Kapasitas Lapas/Rutan se-Daerah Istimewa Yogyakarta :1920 orang. Isi Lapas/Rutan pada tanggal 31Desember 2018 sejumlah 1.620 orang, terdiri dari :

- Narapidana Dewasa Laki-laki	= 996 orang
- Tahanan Dewasa Laki-laki	= 497orang
- Narapidana Anak Laki-laki	= 8orang
- Tahanan Anak Laki-laki	= 0 orang
- Narapidana Dewasa Perempuan	= 82 orang
- Tahanan Dewasa Perempuan	= 37orang
- Narapidana Anak Perempuan	= 0orang
- Tahanan Anak Perempuan	= 0orang

Selama tahun 2018, pelaksanaan kegiatan dan kinerja Divisi Pemasarakatan dijabarkan dalam tabel berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Sidang TPP Kantor Wilayah	Selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018
2.	Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) 2018	Dalam Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) dan Lomba Produk Souvenir Hotel Tahun 2018 tersebut Divisi Pemasarakatan DIY mendapat kategori sebagai Stand dengan Pelayanan Terbaik
3.	Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 s/d 16 Maret 2018</li> <li>• Hotel Burz@ Yogyakarta</li> <li>• Kanwil Kemenkumham DIY dan Jaringan UPT Pemasarakatan</li> </ul>
4.	Monitoring dan Evaluasi UPT Pas	Selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018 seluruh UPT DIY
5.	Pencegahan dan Penindakan Gangguan Kamtib	Selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018 seluruh UPT DIY
6.	Pameran hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan	Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual se-dunia pada tanggal 26 April 2018 di Jogja City Mall
7.	Konsultasi Teknis Bidang Pembinaan, Bimbas, Pengentasan Anak, Informasi, Dan Komunikasi Tentang Implementasi SDP Integrasi Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 – 04 Mei 2018</li> <li>• Hotel Burz@ Yogyakarta, Jl. Jogokariyan No. 61-63 Yogyakarta</li> <li>• Peserta dari seluruh UPT Pemasarakatan yang telah ditunjuk</li> </ul>
8.	Konsultasi Teknis Bidang Kemanan Perawatan Kesehatan dan Pengelolaan Basan Baran di Sahid Jaya Hotel & Convention Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu : 23 s.d. 25 April 2018</li> <li>• Tempat : Sahid Jaya Hotel</li> <li>• Peserta : 30 orang</li> </ul>
9.	Pameran Pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 s.d. 20 Agustus 2018</li> <li>• Taman Pintar Yogyakarta</li> </ul> Petugas Pameran sesuai SP Kakanwil Nomor: W.14-KP.04.01-4437 Tanggal 06 Agustus 2018
10.	Rapat Koordinasi Forum Dilkumjakpol Plus Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin, 10 September 2018</li> <li>• Aula Kantor Wilayah</li> </ul> Diikuti oleh Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, Kepolisian Daerah DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Prov. D.I. Yogyakarta

Divisi Pemasaryakatan Kanwil Kemenkumham DIY, memberikan layanan pemasaryakatan kepada masyarakat dalam bentuk usulan pemberian PB, CB, CMB, dan Asimilasi, sebagai hak warga binaan pemasaryakatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Data Warga Binaan Pemasaryakatan Kanwil kemenkumham DIY

No.	Satuan Kerja	Jumlah Napi & Tahanan	Kapasitas	%	Over %
1	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	342	371	92	
2	LAPAS KELAS II B SLEMAN	286	196	<b>146</b>	<b>46</b>
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYA	330	565	58	
4	LAPAS PEREMPUAN KELAS II B YOGYA	117	125	94	
5	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	12	35	34	
6	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	171	231	74	
7	RUTAN KELAS II B BANTUL	160	127	<b>126</b>	<b>26</b>
8	RUTAN KELAS II B WATES	95	70	<b>136</b>	<b>36</b>
9	RUTAN KELAS II B WONOSARI	94	75	<b>125</b>	<b>25</b>
	TOTAL	1,607	1,920		

Dari table diatas dapat dilihat bahwa 4 Unit Pelaksana Teknis di wilayah DIY telah mengalami over kapasitas yaitu Lapas Kelas IIA Sleman sebesar 146%, Rutan Kelas IIB Bantul sebesar 126%, Rutan Kelas IIB Wates sebesar 136%, dan Rutan Kelas IIB Wonosari sebesar 125%.

Data Usulan Program Reintegrasi 2018

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	205	205
2	CMB	14	14
3	CB	559	558
4	Asimilasi	17	17
5	CMK	-	-
	<b>JUMLAH</b>	795	794

Analisa :

1. Program usulan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Divisi Pemasyarakatan terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Selama tahun 2018 Narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 205 orang dari 205 orang yang diusulkan.
2. Narapidana yang memperoleh program usulan cuti menjelang bebas selama tahun 2018 sebanyak 14 orang dari 14 orang yang diusulkan.
3. Narapidana yang memperoleh program usulan cuti bersyarat yang dilaksanakan pada Divisi Pemasyarakatan pada tahun 2018 sebanyak 558 orang dari 559 orang yang diusulkan. 1 Narapidana tidak disetujui usulan cuti bersyarat karena masuk register F.
4. Narapidana yang memperoleh program Asimilasi selama tahun 2018 sebanyak 17 orang dari 17 orang yang diusulkan.
5. Narapidana yang memperoleh program Cuti Mengunjungi Keluarga selama tahun 2018 sebanyak 0 orang dari 0 orang yang diusulkan.

Tabel 5  
Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

No	Uraian	Tahun		
		31 Des 2016	31 Des 2017	31 Des 2018
1	Pembebasan Bersyarat	145	129	205
2	Cuti Menjelang Bebas	29	15	14
3	Cuti Bersyarat	463	558	558
4	Asimilasi	4	2	17
5	Cuti Mengunjungi Keluarga	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		641	704	794

Analisa :

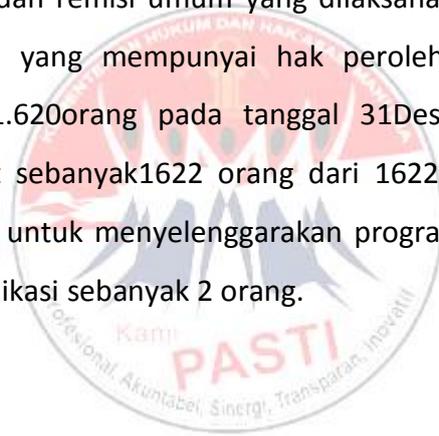
Pada tahun 2016 narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB, dan CMK sebanyak 641 orang, Pada tahun 2017 narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB, dan CMK sebanyak 704 orang sedangkan tahun 2018 narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB, dan CMK sebanyak 794 orang. Jumlah dari tahun ke tahun cenderung naik sesuai dengan peningkatan jumlah WBP.

Data Usulan Remisi

No	Usulan Remisi	Usulan	Disetujui
1	Remisi Khusus Nyepi	1	1
2	Remisi Khusus Imlek	-	-
3	Remisi Khusus Waisak	3	3
4	Remisi Khusus Lanjut Usia	1	1
5	Remisi Khusus Sakit Berkepanjangan	-	-
6	Remisi Khusus Anak	12	12
7	Remisi Khusus Dasawarsa	-	-
8	Remisi Umum 17 Agustus 2018	823	823
9	Remisi Khusus Idul Fitri	714	714
10	Remisi Khusus Natal	68	68

## Analisa :

Program usulan remisi khusus dan remisi umum yang dilaksanakan pada Divisi Pemasyarakatan terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 1.620 orang pada tanggal 31 Desember 2018, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 1622 orang dari 1622 orang yang diusulkan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU Subbidang Registrasi, Informasi dan Komunikasi sebanyak 2 orang.



## DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. Untuk merealisasikan fungsi tersebut dan upaya pencapaian kinerja tahun 2018, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan yang sebelumnya sudah tercantum didalam perjanjian kinerja pada awal tahun 2018.

### Divisi Keimigrasian

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	24 kegiatan	24 kegiatan	100
2.	Jumlah pengawasan Keimigrasian yang sesuai ketentuan	12 LHK	73 LHK	803,33
3.	Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang sesuai dengan ketentuan dari permohonan yang masuk	5000 dok	4997 dok	99,9
4.	Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai dengan ketentuan dari permohonan yang masuk	48.000 dok	52.348 dokumen	109,05
5.	Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian	4 layanan	4 layanan	100,00
6.	Jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT Imigrasi	2 orang	22 orang	850,00
7.	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan	1 LHK	0 LHK	0,00
8.	Jumlah pemeriksa keimigrasian di TPI	1200 pemeriksaan	416.792 pemeriksaan	34,732
9.	Terselenggaranya Layanan Internal overhead	1 layanan	1 layanan	100

Uraian mengenai perbedaan ingin dibuat dan dampak yang ingin dihasilkan pada sasaran strategis

- a. Perbedaan yang ingin dibuat dan dampak yang ingin dihasilkan pada sasaran strategi (1) diatas:
- 1) Adanya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan serta terciptanya sinergitas antara Divisi Keimigrasian dengan UPT Keimigrasian dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Peningkatan kualitas pengawasan keimigrasian yang meliputi pengawasan warga negara indonesia dan warga negara asing yang sesuai dengan peraturan dan pengawasan yang bersih dari pungutan.
  - 3) Keakuratan jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan dari permohonan yang masuk dan memperkecil kesalahan dan pelanggaran penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing.
  - 4) Keakuratan jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang WNI sesuai dengan ketentuan dari permohonan yang masuk dan memperkecil kesalahan dan pelanggaran penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI.
  - 5) Tercapainya layanan informasi dan komunikasi keimigrasian kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik serta sosialisasi keimigrasian kepada masyarakat.
  - 6) Meningkatnya pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kalas I TPI Yogyakarta melalui Pengawasan Keimigrasian dan koordinasi Timpora serta Operasi gabungan Timpora.
  - 7) Tercapainya penegakan hukum keimigrasian berupa Tindakan Administratif Keimigrasian serta belum tercapainya penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi.
  - 8) Meningkatkan pemeriksaan keimigrasian di TPI bagi WNI maupun WNA sesuai dengan aturan yang berlaku, bersih dan tanpa pungutan untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI.
  - 9) Terselenggaranya Layanan Internal *overhead* untuk memangkas waktu pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- b. Uraian strategi yang digunakan dalam capaian sasaran tersebut:

- 1) Melakukan Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
- 2) Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dokumen keimigrasian guna menghasilkan pegawai mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelayanan publik, peningkatan kejelian kualitas wawancara dengan calon pemohon paspor serta meningkatkan kepekaan terhadap adanya indikasi TKI Non Prosedural.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kehumasan serta meningkatkan kuantitas/ intensitas penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi melalui media cetak maupun elektronik.
- 6) Memberikan pemahaman terhadap seluruh pegawai tentang pentingnya pengawasan orang asing terkait dengan perubahan organisasi dan tata kerja kantor imigrasi serta mengingatkan bahwa Kantor Imigrasi sudah harus melaksanakan WBK dan WBBM .
- 7) Perlu dilakukan Pendidikan dan latihan PPNS kepada pejabat imigrasi dan JFU untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam rangka penyidikan keimigrasian.
- 8) Menambah personel pemeriksa keimigrasian di TPI yang dibekali dengan pelatihan teknis keimigrasian serta penggunaan TI.
- 9) Terselenggaranya Layanan Internal *overhead* untuk memangkas waktu pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Divisi Keimigrasian juga memberikan layanan keimigrasian dalam hal pemberian rekomendasi-rekomendasi perpanjangan dokumen Keimigrasian (KITAP, KITAS dll), Penerimaan/permohonan Dokim (Paspor, Stiker VOA, KITAS) dan Perdim dari Ditjenim ke Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*). Pendistribusian Paspor, Stiker VOA, KITAS, dan Perdim dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, kemudian diteruskan ke Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*), serta Terlaksananya penggunaan dan pelaporan Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

**STATISTIK PELAYANAN KEIMIGRASIAN WNI  
JAJARAN DIVISI KEIMIGRASIAN TAHUN 2018**

<b>Bulan</b>	<b>Paspor</b>	<b>ITK</b>	<b>ITAS</b>	<b>ITAP</b>
<b>Tahun 2018</b>				
JANUARI	5144	312	262	3
FEBRUARI	3938	337	127	3
MARET	5610	340	145	10
APRIL	4970	399	129	6
MEI	3532	317	130	11
JUNI	1755	258	95	1
JULI	4442	192	79	2
AGUSTUS	3795	323	429	12
SEPTEMBER	3813	409	373	11
OKTOBER	4262	500	178	8
NOVEMBER	2900	228	41	0
DECEMBER	8187			
<b>TOTAL</b>	<b>52348</b>	<b>3615</b>	<b>1988</b>	<b>67</b>

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah total pemohon paspor pada semester tahun 2018 adalah sebanyak 52.348 paspor. Jumlah total layanan ITK 3.615, ITAS sebanyak 1.988, dan ITAP sebanyak 67 selama tahun 2018.

<b>NO</b>	<b>POA TAHUN 2018</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY	31
2	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	73
<b>Jumlah</b>		<b>104 Kegiatan</b>

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2018 adalah sebanyak 31 kali kegiatan. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing sebanyak 73 kali kegiatan. Total pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing yang

dilakukan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta selama Semester I tahun 2018 adalah sebanyak 104 kali kegiatan.

NO	Rapat TIMPORA	Jumlah Kegiatan
1	Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY	5
2	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	6

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2018 melaksanakan kegiatan Rapat Timpora sebanyak 5 kali. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta melaksanakan kegiatan Timpora sebanyak 6 kali kegiatan.

NO	Operasi Gabungan TIMPORA	Jumlah Kegiatan
1	Tingkat Provinsi	3
2	Tingkat Kabupaten/Kota	1

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Operasi Gabungan TIMPORA selama tahun 2018 melaksanakan kegiatan sebanyak 3 kali pada tingkat Provinsi. Sedangkan pada tingkat Kabupaten melaksanakan kegiatan sebanyak 1 kali kegiatan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pengenaan Pendeportasian sebanyak 22 orang.

## **B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018**

### **1. Pengantar**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang undangan (Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), yang menjalankan visi Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum dan Misi Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;

1. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
  2. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
  3. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
  4. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- serta
5. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

telah melakukan Reformasi Birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik.

Sejak itu, reformasi birokrasi di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan baik dan terus bekerja seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di wilayah kerja dalam upaya peningkatan pelayanan.

Program Reformasi Birokrasi yang dilakukan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta melalui program kerja meliputi 8 (delapan) area perubahan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta sesuai dengan 8 Area Perubahan dan Monitoring & Evaluasi.
2. Penyusunan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2018.
2. Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi.
3. Pelaksanaan rapat kerja Tim Reformasi Birokrasi Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

Monev Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 telah dilakukan terhadap 17 satuan kerja meliputi :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta
2. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
3. Lembaga Masyarakat Kelas IIA Yogyakarta
4. Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
5. Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman
6. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul
8. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates
9. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari
10. Bapas Kelas I Yogyakarta
11. Bapas Kelas II Wonosari
12. Rupbasan Kelas I Yogyakarta
13. Rupbasan Kelas II Bantul
14. Rupbasan Kelas II Wates
15. Rupbasan Kelas II Wonosari.
16. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta
17. Lembaga Masyarakat Perempuan Yogyakarta

## PRESTASI SELAMA TAHUN 2018

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta meraih penghargaan di bidang keuangan, yaitu Peringkat ke 2 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ lembaga (LKKL) Award Tingkat Wilayah TA 2017 kategori besar yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY meraih Terbaik ke-III dalam Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017. Penghargaan ini diberikan saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018 di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY meraih penghargaan sebagai Juara 3 terbaik pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia tanggal 10 Desember 2018 dalam hal pembinaan kepada UPT yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM dan pembinaan seluruh Kabupaten Kotadi DIY peduli HAM.
4. Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, atas prestasi menciptakan 11 (sebelas) Program Kegiatan "Rumah Kreatif Balai Pemasarakatan Jogja" dan meluncurkan layanan berbasis IT SI-BANGO (Sistem Informasi Balai Ngayogyakarta) yang dapat diakses secara offline dilayanan pengunjung maupun secara offline;
5. Piagam penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta kepada Rupbasan Kelas II Wates sebagai terbaik ke-3 : Kepatuhan Satker atas Implementasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2017;
6. Piagam penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta kepada Rupbasan Kelas II Wates sebagai Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam pelaksanaan Anggaran TA 2017 dengan nilai pagu 1 s.d. 5 Miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta.

## C. Realisasi Anggaran

## Realisasi Anggaran Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun 2018

NO	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
1	SETJEND	16.989.940.000	16.795.225.180	98,85%
2	DITJEN AHU	3.745.000.000	3.599.595.305	96,12%
3	DITJEN PAS	770.176.000	747.456.570	97,05%
4	DITJEN IMIGRASI	437.000.000	436.789.288	99,95%
5	DITJEN HKI	630.915.000	630.867.500	99,99%
6	DITJEN PP	195.000.000	194.964.624	99,98%
7	DITJEN HAM	233.699.000	230.793.000	98,76%
8	BPHN	2.169.857.000	2.047.970.800	94,38%
9	BALITBANG HUKUM DAN HAM	58.255.000	58.255.000	100%
10	BPSDM	1.990.990.000	1.964.512.360	98,67%
11	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	13.172.224.000	12.900.445.051	97,94%
12	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA YOGYA	10.532.397.000	10.484.181.496	99,54%
13	LAPAS KELAS II B SLEMAN	10.040.338.000	10.055.899.329	100,15%
14	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	6.796.944.000	6.837.746.234	100,60%
15	RUTAN KELAS II B BANTUL	7.252.387.000	7.351.916.872	101,37%
16	RUTAN KELAS II B WONOSARI	6.054.218.000	6.223.441.529	102,80%
17	RUTAN KELAS II B WATES	5.140.266.000	5.104.646.847	99,31%
18	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	4.651.339.000	4.633.051.351	99,61%
19	BAPAS KELAS II WONOSARI	2.271.196.000	2.301.879.193	101,35%
20	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	2.722.074.000	2.708.995.103	99,52%
21	RUPBASAN KELAS II BANTUL	1.842.073.000	1.802.260.602	98,78%
22	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	974.874.000	952.554.465	97,71%
23	RUPBASAN KELAS II WATES	1.600.316.000	1.599.984.934	99,98%
24	KANTOR IMIGRASI	9.215.591.000	8.969.222.645	97,33%
25	LPP	4.182.708.000	4.479.786.192	107,1%
26	LPKA	9.323.605.000	9.398.380.314	100,80%
<b>TOTAL</b>		<b>122.993.382.000</b>	<b>122.528.108.784</b>	<b>99,62%</b>

Secara umum pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2018 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai barometer pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dan jajarannya berada pada angka 99,62 % (sembilan puluh sembilan koma enam puluh duapersen)/ data pertanggal 31 Desember 2018.

Selain itu pula, sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY juga memperoleh penghargaan dari berbagai instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik vertikal maupun horisontal, antara lain menerima Penghargaan Pengelola Website Terbaik, Penghargaan dalam Pameran Pembangunan Provinsi DIY, menerima Penghargaan dari Kantor Wilayah Perbendaharaan Yogyakarta.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, selama tahun anggaran 2018 Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta telah menjalankan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2014-2019 dalam 8 (delapan) area perubahan dan mengembangkan berbagai program berbasis elektronik (*e-government*) untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

#### A. Rencana Tahun 2019

Selanjutnya, dari uraian Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY tahun 2018 tersebut, terdapat beberapa catatan dan rencana tindak lanjut hal-hal yang harus dilakukan oleh seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Pentingnya mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY;
- b. dibutuhkan peningkatan komitmen antar Divisi di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;

- c. Penetapan tujuan dan sasaran strategis agar menjadi pelajaran dalam rangka meningkatkan Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY pada periode berikutnya;
- d. Melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

<p>Divisi Administrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar divisi melalui pelaksanaan rapat kerja lintas divisi secara periodik</li> <li>2. Pelaksanaan kinerja harus mengacu pada rencana kerja yang telah dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan</li> <li>3. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT atau e-Government</li> <li>4. Realisasi anggaran dengan tingkat penyerapan yang tinggi diawal tahun anggaran</li> <li>5. Bersama-sama mewujudkan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta menjadi urutan 5 besar Kanwil terbaik</li> <li>6. Tim saber Pungli diharapkan dapat berperan aktif dalam pemberantasan pungli di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan teknis</li> <li>8. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan instansi terkait pelaksanaan semua kegiatan di Divisi Administrasi</li> </ol>
<p>Divisi Pemasyarakatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian informasi terkait bebas pungli kepada seluruh pegawai di UPT Pemasyarakatan secara berkesinambungan;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM UPT berupa gerakan revolusi mental melalui ESQ;</li> <li>3. Pemetaan dan pemberian peringatan kepada petugas yang terindikasi melakukan pungli;</li> <li>4. Penindakan kepada pelaku pungli;</li> <li>5. Meningkatkan kapasitas operator (operator SIMAK BMN, SAIBA, RKA-KL, SDP, PB, CMB, CB, dan Remisi) melalui pelatihan;</li> <li>6. Menambah peran pimpinan/atasan langsung dalam pelaksanaan SPIP termasuk kegiatan apel dan jurnal harian kinerja;</li> <li>7. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian masing-masing petugas;</li> <li>8. Memberikan rewards dan punishment kepada petugas pemasyarakatan.</li> <li>9. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan instansi terkait pelaksanaan semua kegiatan di Divisi Pemasyarakatan</li> </ol>

Divisi Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kualitas Sistem APOA di Wilayah;</li> <li>2. Pembayaran PNBP layanan Izin Tinggal secara online;</li> <li>3. Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal secara online;</li> <li>4. Memaksimalkan Unit Layanan Paspot Bantul.</li> <li>5. Optimalisasi pelayanan Keimigrasian di Bandara baru di Kulon Progo</li> <li>6. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan instansi terkait pelaksanaan semua kegiatan di Divisi Keimigrasian</li> </ol>
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kompetensi SDM bagian Pelayanan, memenuhi sarana dan prasana yang memadai, memaksimalkan peran PPNS di Kanwil, koordinasi lebih intensif dengan INI</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan instansi terkait pelaksanaan semua kegiatan di Divisi Pelayanan Hukum</li> <li>3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat</li> </ol>

Tabel kerjasama eksternal (Kantor Wilayah)

No	Instansi	Jenis Kerja Sama
1	2	3
1	Pemda DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediasi dan Konsultasi Raperda/ Perda</li> <li>• Turut serta dalam pameran pembangunan</li> <li>• Pembinaan mewujudkan desa sadar hukum</li> <li>• Pembinaan kabupaten/kota peduli HAM</li> </ul>
2	Ombudsman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama transparansi penyelenggaraan seleksi CPNS</li> <li>• Evaluasi demi perbaikan pelayanan di Kanwil/UPT</li> </ul>
3	Kepolisian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama pengawalan mutasi napi/tahanan</li> <li>• Kerjasamanya penyelenggaraan seleksi CPNS</li> <li>• Kerjasama instansi penegak hukum (DILKUMJAKPOL)</li> <li>• Koordinasi Operasi Timpora</li> </ul>
4	BNNP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama tes urine WBP</li> <li>• Kerjasama pelaksanaan razia di Lapas/Rutan</li> </ul>
5	Kejaksaan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama instansi penegak hukum (DILKUMJAKPOL)</li> </ul>
6	Pengadilan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama instansi penegak hukum (DILKUMJAKPOL)</li> </ul>
7	Bandiklat DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama pelaksanaan LATSAR CPNS</li> </ul>
8	BKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasamanya penyelenggaraan seleksi CPNS</li> </ul>
9	PT POS Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran PNBP Keimigrasian dan pengiriman Paspot</li> </ul>
10	Disnaker DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Operasi Timpora</li> </ul>
11	Perguruan Tinggi di DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama magang atau PKL bagi mahasiswa</li> </ul>
12	Kanwil DJKN, Kanwil DJPB, KPPN, KPKNL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN</li> </ul>

**Tabel kerjasama eksternal (Unit Pelaksana Teknis)**

a) Telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)

No	UPT	KERJASAMA DENGAN	KERJASAMA TENTANG
1	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	Kementerian Agama Kab. Sleman	Pembinaan Kerohanian
		Daarul Mabarroth Ponpes Al Munawir	Kerjasama dalam hal peningkatan dan pengembangan kegiatan bidang pembinaan kepribadian
		Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Kerjasama dalam hal pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
		Perpusda DIY, Kompas Gramedia DIY, PT. Pos Indonesia DIY, dan Pustaka Bergerak	Kerjasama tentang peningkatan budaya membaca dan menulis bagi Narapidana dan Tahanan Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
		Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta	Pembinaan terhadap narapidana korban narkoba melalui program narkoba anonymous (NA)
2	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	Margaria Group	Pelatihan dan Sub Produksi
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	Pelaksanaan proses Asimilasi bagi WBP Lapas Yogyakarta untuk Kasus sesuai Permenkumham No. 21/2013 dan PP 99/2012
		Universitas Respati Yogyakarta	Pengembangan di bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan kesehatan
		Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta	Pelayanan dan Pengamanan
3	Lapas Kelas IIB Sleman	Entrepreneur University	Mentoring Entrepreneur (Program Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan)
		Fakultas Peternakan UGM	Pengembangan Peternakan
		Yayasan Bina Insan Berdikari	Pengelolaan Kampung Asimilasi
		Politeknik Kesehatan Kemenkes DIY	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
4	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	Twin Rajut	Pemberian pembinaan pembuatan aneka macam barang berbahan dasar benang yang dibuat rajutan
		Komunitas Crafter Driji Yogyakarta	Pelaksanaan Pembinaan Bagi WBP Lapas Perempuan Yogyakarta dalam bentuk Pemberian Pelatihan Keterampilan
		Peko-Peko Bags	Pelaksanaan Pembinaan Bagi WBP Lapas Perempuan Yogyakarta dalam bentuk Pemberian Pelatihan Keterampilan Merajut
		Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta	Pembinaan WBP dalam bentuk Kerja Sosial
		Pimpinan Wilayah Aisyiyah Yogyakarta	Pembinaan WBP

5	Bapas Kelas I Yogyakarta	Pemda Kab. Sleman	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pengembangan Rumah Kreatif Bapas Yogyakarta di Kab. Sleman
		Panti Sosial Marsudi Putra Antasena magelang	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
		Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
		Dinas Sosial Kota Yogyakarta	Penyelenggaraan Pelatihan Klien Balai Pemasarakatan
		Pemda Kab. Sleman, PN Sleman, Kejari Sleman, Polres Sleman, Kemenag Kab. Sleman	Kerjasama Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum
		PT. Pradita Adipariwara	Penyelenggaraan Bimbingan Kemandirian Klien Pemasarakatan melalui Praktek Kerja/ Magang
		Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta	Pembimbingan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Klien Pemasarakatan dan ABH
6	Bapas Kelas II Wonosari	Pemerintah Kab. Bantul	Penyelenggaraan Pembimbingan Kemandirian bagi Klien Pemasarakatan Bapas Wonosari
		Dinas Sosial Kab. Bantul	Penyelenggaraan Pembimbingan Kemandirian bagi Ex Narapidana/ Klien Pemasarakatan Bapas Wonosari
7	LPKA Kelas II Yogyakarta	SMA Negeri 1 Wonosari	Layanan Pinjam Kolektif (Peminjaman Buku - Buku Koleksi)
		Tim Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Gajah Mada	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagai kurikulum pendidikan di LPKA Klas IIB Yogyakarta
8	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Pelatihan dan Pendampingan Teknis Budidaya Ikan Air Tawar di Rutan Yogyakarta
		BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi WBP Rutan Yogyakarta
		Universitas Respati Yogyakarta	Pelaksanaan Praktek Lapangan Bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta
9	Rutan Kelas IIB Bantul	UD. Aditya Reka	Pembinaan Ketrampilan Dan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan
		CV. Swastika Globe	Pembinaan Ketrampilan Dan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan
10	Rutan Kelas IIB Wonosari	Pengrajin Gamelan Mainan Ngudi Laras	Pembinaan Kerajinan dan Pertukangan Kayu
11	Rutan Kelas IIB Wates	UPT Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Wates	Pelayanan Kesehatan bagi WBP

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya di wilayah DIY. Laporan Tahunan ini menyajikan rangkuman pencapaian kinerja dan kegiatan selama periode Januari s/d Desember 2018 yang dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, yang meliputi hambatan atau kendala, upaya yang telah dilakukan, maupun langkah yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi kedepan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait penyerapan anggaran, yakni terkait dengan adanya kebijakan nasional tentang revisi anggaran yang berimplikasi pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY tahun anggaran 2018. Hal tersebut kemudian berdampak pada beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal tahun. Selain hal tersebut, beberapa persoalan lainnya ialah, belum tercapainya target dan perlu mendapat perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan proses bisnis di internal Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY.

Penyusunan Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan oleh Pimpinan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk kegiatan tahun selanjutnya.

## B. Saran

Sebagai perbaikan, beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut di antaranya lain adalah:

1. Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas;
2. Meminimalisir adanya revisi anggaran, sehingga penyerapan dan kegiatan akan sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan;
3. Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif;
4. Mempertimbangkan saran dari *stakeholder* terkait dalam rangka peningkatan kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY;
5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis;
6. Mengusahakan melengkapi sarana dan prasarana sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY.

Akhirnya, perlu disadari bahwa pekerjaan tugas dan tanggung jawab di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY sangatlah kompleks dan tentu saja membutuhkan kerjasama seluruh *stake holder* dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan dimulai dengan dilakukannya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dengan baik.

Tahap selanjutnya adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak atau instansi terkait, seluruh *stake holder*, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, dalam hal perencanaan, perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas di Kementerian Hukum dan HAM secara optimal dan terpadu.

Semoga Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan Tahun Anggaran 2018 serta menyediakan informasi penting terkait pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada publik.



Yogyakarta, Januari 2019  
Kepala Kantor Wilayah

KRISMONO  
NIP. 19611217 198503 1 001



# KEGIATAN DALAM GAMBAR





2 Januari 2018 Apel Pagi Kanwil Kumham DIY



15 Januari 2018 Rapat Panitia CPNS



3 Rapat Divisi Administrasi



16 Januari 2018 Peresmian Lift Rupbasan Yk



8 Januari 2018 Apel Janji Kinerja 2018



17 Januari Pelantikan PPNS



11 Januari 2018 Pelantikan Kepala Kantor Imigrasi



19 Januari 2018 Pelatihan Dharma Wanita



22 Januari 2018 Pembukaan Orientasi CPNS



26 Januari 2018 HUT Imigrasi



23 Orientasi CPNS di Brimob



31 Pelepasan Kadiv Imigrasi



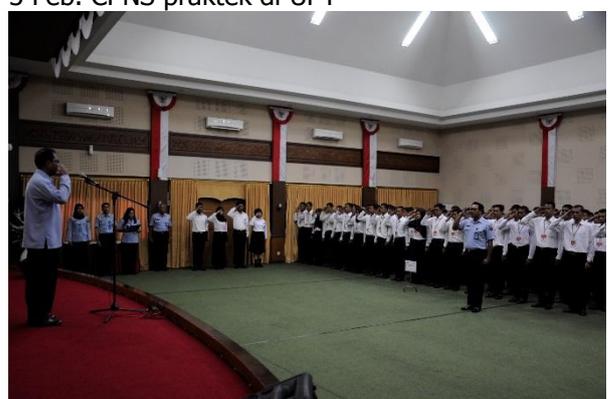
23 Januari 2018 Rekonsiliasi Keuangan



3 Feb. CPNS praktek di UPT



24 Januari 2018 Kegiatan Tabur Bunga



5 Feb. Penutupan Orientasi CPNS



5 Feb. Pembangunan Zona Integritas



20 Feb. Tes Urine Lapas Narkotika



6 Feb. RAT Koperasi



22 Feb. Kunjungan Kakanwil ke Rutan Bantul



6 Feb. Pendampingan SPIP



1 Maret Persiapan CPNS



9 Feb. Pameran Hasil Karya Napi



9 Maret Rapat Target Kinerja



19-03 Penyusunan Standar Pelayanan Publik



27 Maret Teleconference Presiden CPNS



22 Maret Pisah Sambut Kadivmin



28 Maret Penandatanganan Pakta Integritas



23 Maret Audiensi dengan instansi Kejati



28 Maret Rakor Rencana Kerja dan Anggaran



2 April Kunjungan Komisi III DPR RI di Polda DIY



Kakanwil dan jajaran menjawab pertanyaan Komisi III



4 April Kadivmin memberikan materi kegiatan INI



Kegiatan INI (Ikatan Notaris Indonesia)



Pameran hasil karya WBP



Lomba Futsal antar pegawai Kemenkumham



Sosialisasi Kewarganegaraan



Bakti Sosial HUT Pemasarakatan



Bakti sosial Lanjut Usia dan Yatim piatu



Kuliah umum praktek Legal Drafting



Koordinasi dengan Ombudsman RI DIY



Sosialisasi sekolah kedinasan Poltekip



Rapat Kerja Aksi HAM



Konsultasi Teknis PAS di Hotel Sahid Raya



Kakanwil dengan peserta KontekPAS



Sosialisasi Seleksi Pimpinan



Kakanwil *on air*Radio Sonora FM



Expo Kekayaan Intelektual di JCM



Salah satu *performance art* di KI expo



Kakanwil membuka secara resmi KI expo



Salah satu stand di KI expo



CPNS mengikuti teleconference LATSAR



Talkshow Kekayaan Intelektual di JCM



Upacara HUT Pemasarakatan



Kakanwil membacakan sambutan HUT PAS



Bpk Sekretaris Jenderal membuka secara simbolis



Pagelaran wayang kulit memperingati hari KI



Kegiatan Workshop Tunas Integritas



Sosialisasi LHKPN



Upacara Hari Kebangkitan Nasional



Kakanwil dalam pemusnahan barang bukti



Kegiatan Dilkumjarkpol di Hotel Daffam Rohan



19 Juli Kota Peduli HAM



25 Juli Kunjungan Dirjen Imigrasi



19 Juli Kota Peduli HAM



25 Juli Kunjungan Dirjen Imigrasi



19 Juli Pembukaan Latsar Gol. II



25 Juli Pertemuan bilateral Imigrasi Singapura



19 Juli Pembukaan Latsar Gol. II



25 Juli Pertemuan bilateral Imigrasi Singapura



30 Juli Pra kontruksi pembangunan LPKA



31 Juli Pelantikan Notaris



30 Juli Pra kontruksi pembangunan LPKA



6 Agustus pelantikan JFT PK Bapas



31 Juli Launching Rumah Kreatif Bapas



6 Agustus pelantikan JFT PK Bapas



31 Juli Launching Rumah Kreatif Bapas



16 Agustus Upacara Penyerahan Remisi



16 Agustus Upacara Penyerahan Remisi



9 Agustus Dialog Fidusia



Kegiatan Lomba Kemerdekaan RI



31 Agustus Hari Keistimewaan DIY



Kegiatan Lomba Kemerdekaan RI



4 September Sertijab Karupbasan Yogyakarta



9 Agustus Dialog Fidusia



4 September Sertijab Karupbasan Yogyakarta



10 September Rakor Dilkumjakpol



18 September Rapat Evaluasi Tarja



12 September Kuliah Umum Dirjen KI



18 Supervisi RKA-KL Pagu Anggaran



12 September Kuliah Umum Dirjen KI



18 Supervisi RKA-KL Pagu Anggaran



1 Oktober Peringatan Hari Kesaktian Pancasila



1 Oktober Peringatan Hari Kesaktian Pancasila



3 Oktober Upacara Pembukaan HDKD



3 Oktober Upacara Pembukaan HDKD



5 Oktober Penutupan LATSAR



5 Oktober Penutupan LATSAR



Perlombaan Tenis Meja peringati HDKD



Perlombaab Bulutangkis peringati HDKD



Jalan sehat peringati HDKD



Jalan sehat peringati HDKD



29 Oktober Upacara sumpah pemuda



Temu Nasional Paralegal



8 November Peninjauan LPKA



26 Pelatihan PR



Grand Launching Aplikasi Siemon



Grand Launching Aplikasi Siemon



Rakor Penyusunan Disbursement Plan



Dialog Fidusia



Kunjungan Direktur Jenderal PP



Tes Kesamptaan Seleksi CPNS



Tes Kesamptaan Seleksi CPNS



Tes Kesamptaan Seleksi CPNS



Tes CAT di BKN Seleksi CPNS



Tes CAT di BKN Seleksi CPNS



Tes CAT di BKN Seleksi CPNS



13 Des. Upacara Peringatan Hari Nusantara



13 Des Upacara Peringatan Hari Nusantara



20 Desember Sertijab Kakanwil



20 Desember Sertijab Kakanwil



Kunjungan Kakanwil ke Rutan Wates



22 Desember Upacara Peringatan Hari Ibu



31 Refleksi Akhir Tahun 2018